



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan perlu merubah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2017;
- b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sepanjang mengenai Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yaitu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis IMTAQ				
1.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 	<p style="text-align: center;">Indeks (Xi) = $(Xi - Xmin) / (Xmaks - Xmin)$</p> <p style="text-align: center;">Xi : Indikator komponen pembangunan manusia ke-i, i = 1,2,3</p> <p style="text-align: center;">Xmin : Nilai minimum Xi</p> <p style="text-align: center;">Xmaks : Nilai Maksimum Xi</p> <p style="text-align: center;">(Indeks Harapan Hidup = X1, Pengetahuan = X2 dan Standar Hidup Layak = X3)</p>	<p>Badan Pusat Statistika (BPS) Kab. Asahan</p>
2.	Kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Konflik SARA bernuansa Agama 	<p>Jumlah konflik SARA yang ditangani/Total Jumlah konflik SARA x 100%</p>	<p>Badan Kesbangpol</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran kesehatan masyarakat				
3.	Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Rumah Sakit Dengan Nilai IKM Sesuai Standart	Nilai rata - rata hasil survey kepuasan pelanggan di RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran	RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Bayi usia 0 - 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	Jumlah Balita yang menurut indikator berat badan menurut umur ambang batas status gizinya berada di -3 standar deviasi s/d < -2 standar deviasi	Dinas Kesehatan
4.	Terwujudnya lingkungan hidup yang sehat	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	Luas permukiman kumuh ditangani dibagi jumlah luas permukiman kumuh dikali 100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang berkeadilan				
5	Pendidikan yang berkualitas dan merata	APK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 Tahun	Jumlah siswa jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 Tahun berbagai usia dibagi jumlah penduduk usia 0-12 tahun x 100	Dinas Pendidikan
		APM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 Tahun	Jumlah siswa jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar 9 Tahun usia 0-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 0-12 tahun x 100	Dinas Pendidikan
		Persentase angka melek huruf penduduk usia dewasa usia > 15 Tahun	Penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca tulis dibagi penduduk usia di atas 15 tahun	Dinas Pendidikan
		Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4. Mengembangkan pola pembangunan yang partisipatif, proaktif, kreatif dan inovatif dengan menjadikan masyarakat yang cerdas sebagai basis utama pelaku pembangunan ditengah kompetisi global				
6	Meningkatkan pola pembangunan kreatif dan inovatif	▪ Indeks Gini	$GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi-1]$; GR=Koefisien Gini, fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke I; Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.	Badan Pusat Statistika (BPS) Kab. Asahan
		▪ Nilai Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Investasi Berskala Nasional, PMA dan PMDN (Perusahaan)	Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		▪ Jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin tahunn	Badan Pusat Statistika (BPS) Kab. Asahan
7	Meningkatnya kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	▪ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angkatan kerja / Penduduk usia kerja x100	Dinas Tenaga Kerja
		▪ Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penganggur/Jumlah angkatan kerja x 100	Dinas Tenaga Kerja
8	Meningkatnya perekonomian yang baik	▪ Laju Inflasi	Laju inflasi = (Indeks Harga periode n – Indeks Harga Periode sebelumnya)/ Indeks Harga Periode sebelumnya x 100%	Badan Pusat Statistika (BPS) Kab. Asahan
		▪ Laju Pertumbuhan ekonomi	$R(t-1,t)=PDBt - PDBt-1 /PDBt-1 \times 100\%$; Laju Pertumbuhan ekonomi =(pendapatan daerah pada tahun t- pendapatan daerah pada tahun t (tahun sebelumnya)/ pendapatan daerah pada tahun t (tahun sebelumnya) x 100%	Badan Pusat Statistika (BPS) Kab. Asahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5. Mengelola kemajemukan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan memelihara kearifan lokal.				
9	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> Persentase masyarakat yang masih menjaga budaya melayu 	Jumlah masyarakat yang menjaga budaya Melayu/Jumlah masyarakat	Dinas Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> Situs Pelestarian Cagar Budaya 	Jumlah benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi total benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dimiliki Pemerintah x 100	Dinas Pendidikan
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima untuk mendorong percepatan pembangunan				
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> Nilai capaian laporan Kinerja (LKj) 	Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Asahan yang diberikan Menteri PAN dan RB pada tahun n	Bagian Organisasi
		<ul style="list-style-type: none"> Nilai LPPD oleh Tim EKPPD 	Hasil Penilaian Evaluasi Tim EKPPD	Bagian Pemerintahan
		<ul style="list-style-type: none"> Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 	opini terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah (WTP, WDP)	BPKAD
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP 	Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP / Total OPD x 100%	Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya secara merata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berwawasan lingkungan.				
11	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 	Panjang jalan kondisi baik dibagi jumlah panjang seluruhnya dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman 	Jumlah penduduk terlayani air minum (perpipaan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Terpenuhinya pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Luas Irigasi Kabupaten Asahan dalam Kondisi Baik (ha) 	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik / Luas Irigasi Kabupaten x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	lingkungan yang bersih dan nyaman	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 	Luas ruang terbuka hijau dibagi Luas wilayah ber HPL/HGB dikali 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	lingkungan permukiman yang sehat	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Layak Huni (%) 	Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 100 %	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
8. Mendorong terciptanya penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), keamanan, ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat				
15	Peningkatan Kepastian hukum masyarakat dan produk hukum daerah yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan anak terselesaikan 	Korban kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan penanganannya / Korban kekerasan Perempuan dan Anak yang melapor x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah / Jumlah Pekerja Perempuan x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penurunan PMKS 	$\sum \text{PMKS thn (n)} - \text{thn (n-1)} / \sum \text{PMKS thn (n-1)} \times 100$	Dinas Sosial
17	Meningkatnya Penanganan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penanganan PMKS 	PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS yang ada x 100	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
18	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat 	$\frac{\text{Jumlah gangguan trantibum}}{\text{Jumlah trantibum yang diselesaikan}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	
		<ul style="list-style-type: none"> Persentase Jumlah Desa Tangguh Bencana 	$\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Desa Rawan Bencana}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		<ul style="list-style-type: none"> Tingkat penanganan kejadian kebakaran (persen) 	$\frac{\text{Jumlah penanganan kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	
		<ul style="list-style-type: none"> Tingkat waktu tanggap (response time rate) 	Menggunakan alat ukur waktu tempuh/stopwatch (waktu dihitung mulai dari terima berita, dalam perjalanan dan tiba di lokasi)	Satuan Polisi Pamong Praja	
		<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Penanganan Kejadian Bencana 	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kejadian Bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian Bencana}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
9. Meningkatkan daya saing pertanian dalam arti luas					
19	Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija (Kwintal/Ha) 	Produksi/Luas Panen	Dinas Pertanian	
					Padi
					Jagung
					Kedelai
					Kacang Tanah
					Kacang Hijau
					Ubi Kayu
Ubi Jalar					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> Produksi Tanaman Pangan dan Palawija (Ton) 	<p style="text-align: center;">Luas Panen x Produktivitas</p>	Dinas Pertanian
			Padi	
			Jagung	
			Kedelai	
			Kacang Tanah	
			Kacang Hijau	
			Ubi Kayu Ubi Jalar	
		<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan Pangan Utama Beras (ton) 	63,20% X Produksi padi (GKG)	Dinas Ketahanan Pangan
20	Meningkatnya hasil produk unggulan perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Produksi Kelapa Sawit (ton) 	Luas tanaman menghasilkan x produktivitas	Dinas Pertanian
		<ul style="list-style-type: none"> Produksi Cokelat (ton) 	Luas tanaman menghasilkan x produktivitas	Dinas Pertanian
		<ul style="list-style-type: none"> Produksi Karet (ton) 	Luas tanaman menghasilkan x produktivitas	Dinas Pertanian
		<ul style="list-style-type: none"> Produksi Kelapa (ton) 	Luas tanaman menghasilkan x produktivitas	Dinas Pertanian
		<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 	\sum NTB (i)	Dinas Pertanian
21	Meningkatnya produksi peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Produksi daging (ton) 	Jumlah ternak yang dipotong x berat karkas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22	Meningkatnya produksi budidaya perikanan air tawar dan perikanan laut	<ul style="list-style-type: none"> Produksi Perikanan budidaya (ton) 	Total Produksi ikan dalam 1 tahun	Dinas Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
10. Melakukan percepatan pembangunan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan investasi daerah yang dipadukan dengan koperasi dan UKM, pariwisata, perdagangan, industri, pembangunan pasar tradisional dan modern.				
23	Meningkatnya ekonomi kerakyatan melalui peran koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Koperasi Aktif 	jumlah koperasi aktif / jumlah seluruh koperasi x 100 %	Dinas Koperasi dan Perdagangan
24	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kunjungan ke tempat wisata (org) 	Jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek wisata	Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata
25	Tersedianya akses perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 	Jumlah PDRB sektor perdagangan / Jumlah PDRB x 100 %	Dinas Koperasi dan Perdagangan
		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi UKM non BPR (LKM UKM) 	Jumlah UKM non BPR (LKM UKM)	Dinas Koperasi dan Perdagangan
26	Meningkatkan peranan Industri dalam perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pertumbuhan Industri Mikro (%) 	Jumlah Industri tahun n - jumlah industri tahun (n-1) / jumlah industri n-1 x 100%	Dinas Ketenagakerjaan
		<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) 	Jumlah PDRB sektor industri / Jumlah PDRB x 100 %	Dinas Ketenagakerjaan

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017

1. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase OPD yang mendapat temuan kerugian daerah yang material.	(Jumlah OPD yang mendapat temuan kerugian daerah yang material dibagi jumlah OPD yang diperiksa) dikali 100%	LHP BPK RI
		2. Persentase OPD yang mendapat temuan barang/aset yang material	(Jumlah OPD yang mendapat temuan barang/aset yang material dibagi jumlah OPD yang diperiksa) dikali 100%	LHP BPK RI
2.	Meningkatnya pengimplementasian SPIP	1. Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	(Jumlah OPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dibagi Jumlah Seluruh OPD) dikali 100%	Bagian Organisasi
3.	Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat	1. Persentase pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan	(Jumlah pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang diterima) dikali 100%	Laporan Pengaduan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya permintaan layanan konsultasi	1.	Permintaan layanan konsultasi	Jumlah permintaan layanan konsultasi	Surat Masuk
5.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundangan	1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	LHP BPK RI
		2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang selesai ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	LHP Irjen, BPKP, Itprovsu dan Insp. Kab.
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	1.	Persentasi OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	(Jumlah OPD yang nilai evaluasi AKIP nya minimal B dibagi jumlah seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Asahan yang dievaluasi) x 100%	LHE dan KKE

2. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan	APK PAUD	Jumlah siswa jenjang PAUD formal berbagai usia / jumlah penduduk usia jenjang PAUD formal x 100 %	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI/ Paket A	Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A berbagai usia / jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs/ Paket B	Jumlah siswa jenjang SMP/MTs/Paket B berbagai usia/ jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP, MTs / Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya x 100 %	Dinas Pendidikan
		Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan/BPS
2	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi	Jumlah lembaga PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang sudah akreditasi / Jumlah lembaga PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang belum akreditasi x 100 %	Dinas Pendidikan
		Persentase guru SD dan SMP bersertifikat pendidik	Jumlah guru SD dan SMP bersertifikat pendidik / Jumlah guru SD dan SMP x 100 %	Dinas Pendidikan
		Persentase guru memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah guru lulusan sarjana / Jumlah guru x 100 %	Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai UN SD/MI dan SMP/MTs	Total nilai UN siswa / Jumlah siswa	Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Meningkatnya pelestarian objek tradisi	Jumlah objek tradisi yang dilestarikan	Jumlah objek tradisi yang dilestarikan	Dinas Pendidikan
			Jumlah objek seni budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan BPK/Inspektorat x 100 %	Dinas Pendidikan
		Nilai Evaluasi AKIP	Jumlah nilai evaluasi AKIP	Dinas Pendidikan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey kepada masyarakat	Dinas Pendidikan

3. DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Laporan Rutin Bulanan Bid. Kesehatan Masyarakat
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	Jumlah Balita yang menurut indikator BB menurut umur ambang batas status gizinya berada di $-3 SD \leq -2 SD$	Laporan Rutin Bulanan Bid. Kesehatan Masyarakat
	Menurunnya Angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit	Persentase Penurunan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah Penderita DBD di suatu wilayah tertentu	Laporan Rutin Bulanan Bid. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
		Persentase Desa Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Desa yang melaksanakan STBM ===== x 100 % Jumlah Seluruh desa	Laporan Rutin Bulanan Bid. Kesehatan Masyarakat
		Persentase Rumah Tangga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Jumlah Rumah Tangga yang ber PHBS ===== x 100 % Jumlah Rumah Tangga yang di pantau	
		Persentase Desa Siaga Aktif	Jumlah Desa Siaga Aktif ===== x 100 % Jumlah Seluruh Desa di suatu wilayah pada waktu tertentu	Laporan Rutin Bulanan Bid. Kesehatan Masyarakat

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Mewujudkan Infrastruktur jalan yang berkualitas	1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%	Dinas PUPR
2	Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan sistem irigasi	2	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah total jaringan irigasi kabupaten dikali 100%	Dinas PUPR
3	Mengarahkan perwujudan tertib penataan ruang	3	Peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	Pertambahan jumlah unit gedung yang memiliki IMB	Dinas PUPR
4	Meningkatkan pengelolaan dan penataan ruang terbuka hijau	4	Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang berkualitas di kawasan perkotaan	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang baik dibagi jumlah luas ruang terbuka hijau perkotaan dikali 100%	Dinas PUPR
5	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik dan aparatur	5	Persentase bangunan pelayanan publik dan aparatur berfungsi baik	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik dibagi jumlah seluruh bangunan pelayanan publik dikali 100%	Dinas PUPR

5. DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah yang menganggur dibagi Jumlah angkatan kerja dikali 100%	Dinas Ketenagakerjaan
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah tenaga kerja mendaftarkan dikali 100%	
3	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi Jumlah kasus yang dicatat dikali 100%	
		Persentase perusahaan yang mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang dibina dibagi Jumlah perusahaan yang terdaftar dikali 100%	
4	Meningkatnya mutu produk industri	Persentase produk yang bersertifikat mutu	Jumlah produk yang bersertifikat mutu dibagi Jumlah produk yang terdaftar dikali 100%	
	Berkembangnya industri mikro	Jumlah pelaku industri mikro	Jumlah pelaku industri mikro	
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB sektor industri dibagi Jumlah PDRB dikali 100%	
5	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan OPD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketenagakerjaan		
		Nilai Hasil Evaluasi AKIP		
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti		

6. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terciptanya kondisi transportasi yang selamat (safety), nyaman (compertheble), serta tekendali.	Angkutan umum yang lulus uji persyaratan teknis dan laik jalan	$\frac{\text{Jumlah angkutan yang lulus uji}}{\text{Jumlah angkutan yang melakukan uji berkala}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		Persentase jalan kewenangan Kabupaten dengan tingkat Pelayanan B	$\frac{\text{Jumlah ruas jalan dengan tingkat Pelayanan B}}{\text{Jumlah ruas jalan Kabupaten Asahan}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		Persentase jumlah kecelakaan fatal	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan fatal}}{\text{Jumlah kecelakaan yang terjadi}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		Jumlah titik simpul kemacetan	Penurunan jumlah titik simpul kemacetan di ruas jalan Kabupaten Asahan	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Jumlah total skor/jumlah pertanyaan}}{\text{Skor alternatif jawaban terbesar}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan

7. DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Diskopdag
2	Meningkatnya usaha mikro	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Diskopdag
		Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	
3	Meningkatnya kontribusi perdagangan bagi perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah PDRB Perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Diskopdag dan BPS

8. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya peningkatan kualitas dan keterampilan pemuda	Jumlah tersangka pemuda terlibat narkoba	Jumlah tersangka pemuda yang terlibat narkoba di kabupaten Asahan	BNN
		Jumlah pemuda yang berprestasi dibidang pemuda pelopor	Jumlah pemuda yang berprestasi di Kab.Asahan	
		Jumlah wirausaha pemuda	Jumlah pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Asahan	
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang meraih medali	Jumlah cabang olahraga yang meraih medali di setiap kejuaraan	Disporapar
		Jumlah atlet pelajar berprestasi	Jumlah atlet pelajar yang berprestasi dari Kabupaten Asahan	
3	Meningkatnya kualitas Pariwisata	Tingkat kunjungan Wisata	Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Asahan	

9. DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produksi dan Produktivitas Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah (ton) ikan yang dihasilkan melalui kegiatan usaha budidaya perikanan	Dinas Perikanan
2	Bidang Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	jumlah (ton) hasil tangkapan ikan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Asahan	Dinas Perikanan
3	Asahan sebagai sentra benih	Jumlah Produksi benih (ekor)	Jumlah (ekor) benih ikan yang dihasilkan melalui kegiatan usaha budidaya perikanan	Dinas Perikanan
4	Meningkatnya Ketersediaan ikan	Tingkat Konsumsi ikan	Rasio antara ketersediaan ikan dibandingkan dengan jumlah penduduk	Dinas Perikanan

10. DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Palawija	Produksi Tanaman Pangan (Ton) GKG	Luas Panen X Produktivitas	Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kab. Asahan
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija	Produktivitas Tanaman Pangan (Kw/Ha) GKG	Produksi / Luas Panen	Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kab. Asahan
2	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Produktivitas X Luas Tanaman Menghasilkan	Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kab. Asahan
	Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton/Ha/Tahun)	Jumlah Produksi / Luas Tanaman Menghasilkan	Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kab. Asahan
3	Mendorong pertumbuhan produk yang berdaya saing	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	\sum NTB (i)	Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian Kab. Asahan

11. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produksi hasil daging untuk memenuhi kebutuhan protein hasil hewan	Jumlah Produksi Daging	Jumlah ternak yang dipotong X berat Karkas	Statistik Peternakan
		Jumlah Produksi Telur	Jumlah Unggas X 0.6 X 0.75	Statistik Peternakan
2	Meningkatnya hasil peternakan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan daging, mutu dan keamanan	Populasi Sapi Potong	Jumlah Populasi Sapi Potong	Statistik Peternakan
		Populasi Kerbau	Jumlah Populasi Kerbau	
		Populasi Kambing	Jumlah Populasi Kambing	
		Populasi Domba	Jumlah Populasi Domba	

12. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang masuk dokumen RKPD}}{\text{Jumlah seluruh aspirasi masyarakat melalui musrenbang Kabupaten}} \times 100\%$	Bappeda Asahan
		Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD	<p>Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD = $(Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5+Ki6)/6$</p> <p>Ki1 =keselarasan sasaran = $\frac{\text{Jumlah Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki2 =keselarasan Indikator sasaran = $\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki3 =keselarasan Target sasaran = $\frac{\text{Jumlah Target Sasaran Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki4 =keselarasan Program = $\frac{\text{Jumlah Program PadaRenstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Ki5 =keselarasan Indikator Program = $\frac{\text{Jumlah Indikator Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p>	Bappeda Asahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Ki6 =keselarasan Target Program = $\frac{\text{Jumlah Target Program Pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD} \times 100\%}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}}$	
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	$\text{Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD} = \frac{\text{Ki1} + \text{Ki2} + \text{Ki3} + \text{Ki4} + \text{Ki5} + \text{Ki6}}{6}$	
			Ki1 =keselarasan sasaran = $\frac{\text{Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$	
			Ki2 =keselarasan Indikator sasaran = $\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$	
			Ki3 =keselarasan Target sasaran = $\frac{\text{Jumlah Target Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$	
			Ki4 =keselarasan Program = $\frac{\text{Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	
			Ki5 =keselarasan Indikator Program = $\frac{\text{Jumlah Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPJMD}} \times 100\%$	
			Ki6 =keselarasan Target Program = $\frac{\text{Jumlah Target Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}} \times 100\%$	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	<p>Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap RPJMD = $(Ki1+Ki2+Ki3+Ki4+Ki5+Ki6)/6$</p> <p>Ki1 =keselarasan Program = $\frac{\text{Jumlah Program pada Renja yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}} \times 100\%$</p> <p>Ki2 =keselarasan Indikator Program = $\frac{\text{Jumlah Indikator Program pada Renja yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RKPD}} \times 100\%$</p> <p>Ki3 =keselarasan Target Program = $\frac{\text{Jumlah Target Program pada Renja yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Program pada RKPD}} \times 100\%$</p> <p>Ki4 =keselarasan Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Kegiatan pada RKPD}} \times 100\%$</p> <p>Ki5 =keselarasan Indikator Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Indikator Kegiatan pada Renja OPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Kegiatan pada RKPD}} \times 100\%$</p> <p>Ki6 =keselarasan Target Kegiatan = $\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan pada Renja OPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Kegiatan pada OPD}} \times 100\%$</p>	
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Terlaksananya program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Persentase program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	$\frac{\text{Jumlah program APBD}}{\text{Jumlah program RKPD}} \times 100\%$	Bappeda Asahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3.	Data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase data yang akurat untuk perencanaan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah data yang akurat}}{\text{Jumlah total data}} \times 100\%$	BPS Kab. Asahan
4.	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan Bappeda	Nilai evaluasi AKIP		Inspektorat Kab. Asahan
		Persentase Temuan Anggaran yang ditindaklanjuti		BPK / Inspektorat Kab. Asahan
	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\text{NRR per Responden} = \frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NRR tertimbang per unsur} = \frac{\text{NRR per Responden}}{12}$ $\text{Nilai Indeks} = \text{Jumlah NRR tertimbang per unsur}$ $\text{IKM} = \text{Nilai Indeks} \times (100\%; 4 \text{ indeks})$	Bappeda Asahan

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG